



Implementasi Teknologi Informasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Pendekatan Coso Dan Tam

Afika Mardiyana Nur Khasanah¹, Bambang Widarno²

^{1,2}Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda No. 18. Kadipiro, Kec, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

fikkamardiyana@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 Maret 2026

Received in revised form 05 April 2026

Accepted 12 April 2026

Available online 30 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) information technology by applying the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework and the Technology Acceptance Model (TAM) in Daleman Village, Lawu Village, and Baran Village, Sukoharjo Regency. By adopting a qualitative descriptive approach and triangulation methods, the research establishes that internal control mechanisms under the COSO guidelines are being applied productively. Such compliance is demonstrated through the mandatory cross-verification process conducted by the Financial Officer and Village Secretary, supported by the analytical capabilities of the system's built-in audit trail. From the TAM perspective, village officials show a high level of technology acceptance, since the system is perceived to provide considerable ease of use and significant benefits in improving the efficiency of financial reporting. Nevertheless, several technical challenges remain, particularly server congestion during peak reporting periods. In addition, there is still a limitation in external transparency, as the dissemination of financial information through digital platforms such as village websites has not been optimally socialized to the community. As a result, many residents continue to rely on conventional information channels such as information boards and village meetings. Therefore, although internal accountability has been well established, improvements in digital infrastructure and communication strategies are necessary to strengthen transparency in village financial management.

Keywords: SISKEUDES, COSO, TAM, Accountability, Village Transparency.

Abstrak

Observasi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi informasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan menggunakan pendekatan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dan Technology Acceptance Model (TAM) pada Desa Daleman, Desa Lawu, dan Desa Baran yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Observasi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta memanfaatkan teknik triangulasi data untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan sistem tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal yang mengacu pada kerangka COSO telah diterapkan secara cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui adanya proses verifikasi bertingkat di antara aparatur desa serta pemanfaatan fitur audit trail pada sistem yang memungkinkan setiap aktivitas pencatatan maupun perubahan data dapat ditelusuri secara jelas.

Dilihat dari perspektif Technology Acceptance Model (TAM), aparatur desa menunjukkan tingkat penerimaan teknologi yang tinggi terhadap penggunaan sistem tersebut. SISKEUDES dinilai mampu memberikan kemudahan dalam pengoperasian sekaligus memberikan manfaat nyata, terutama dalam mempercepat proses penyusunan dan pelaporan keuangan desa.

Walaupun demikian, observasi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala teknis yang masih terjadi, seperti kemacetan server (server bottleneck) ketika memasuki periode pelaporan yang padat. Selain itu, transparansi kepada masyarakat masih menghadapi keterbatasan karena penyampaian informasi berbasis digital melalui website desa belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Akibat kondisi tersebut, sebagian masyarakat masih mengandalkan media konvensional, seperti papan informasi desa dan musyawarah desa, untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, meskipun akuntabilitas internal telah berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan pada infrastruktur teknologi digital serta strategi komunikasi publik agar transparansi pengelolaan keuangan desa dapat tercapai secara lebih optimal.

Kata Kunci: SISKEUDES, COSO, TAM, Akuntabilitas, Transparansi Desa.

1. PENDAHULUAN

Instrumen utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab terletak pada manajemen finansial desa yang mumpuni. Adanya pembaruan regulasi dari UU No. 6 Tahun 2014 ke UU No. 6 Tahun 2023 memberikan legitimasi bagi aparatur desa untuk mengurus urusan keuangannya secara mandiri tanpa intervensi berlebihan (BPK RI, 2014). Hak otonomi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam merencanakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, optimalisasi distribusi dana desa diproyeksikan mampu menjadi katalisator dalam mempercepat kemajuan wilayah sekaligus mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat di pedesaan [1].

Fenomena meningkatnya tren alokasi dana desa saat ini sering kali tidak disertai dengan penguatan kompetensi manajerial yang sepadan bagi para pengelolanya. Implementasi di tingkat basis masih diwarnai oleh beragam defisit, mulai dari ketidakteraturan sistem pelaporan hingga belum optimalnya fungsi pengawasan internal yang seharusnya menjadi benteng pertahanan keuangan. Situasi ini secara langsung membuka ruang bagi terjadinya inkonsistensi administratif maupun potensi moral hazard dalam penggunaan dana publik tersebut. Maka dari itu, transformasi tata kelola keuangan desa menjadi agenda yang mendesak untuk dilaksanakan demi mewujudkan sistem pengelolaan yang lebih profesional, jujur, dan berorientasi pada hasil [2].

Transparansi dan akuntabilitas menjadi target utama dalam pengembangan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebuah platform yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP bagi pemerintah desa. Aplikasi ini memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi pengelola keuangan desa untuk menjalankan fungsi perencanaan, tata usaha, serta pelaporan secara lebih tertib dan terorganisir. Dengan memanfaatkan kecanggihan sistem informasi dalam pelayanan publik, diharapkan tercipta tata kelola yang lebih bersih dan efisien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat terus meningkat secara signifikan [3].

Terlepas dari manfaatnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES masih menemui hambatan serius terkait kesiapan SDM dalam menjalankan sistem informasi berbasis digital tersebut. Observasi yang dipaparkan oleh Nurrahmawati et al. [4] menegaskan bahwa integrasi SISKEUDES sangat membantu dalam memperlancar manajemen anggaran serta mengoptimalkan kinerja birokrasi desa dalam proses pelaporan berkala. Selain itu, terdapat pandangan luas bahwa sistem informasi keuangan desa mampu menjadi katalisator bagi terciptanya tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, asalkan seluruh fungsionalitas sistem tersebut diterapkan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab [5].

Efektivitas sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi menjadi faktor pendukung utama bagi keberhasilan implementasi teknologi informasi selain infrastruktur teknis itu sendiri. Kerangka kerja internasional COSO membagi sistem pengendalian tersebut ke dalam lima dimensi penting, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian terhadap risiko, aktivitas kontrol, sistem informasi dan komunikasi, serta mekanisme pemantauan. Penguatan pada kelima dimensi ini sangat diperlukan agar seluruh rangkaian proses manajerial, terutama terkait keuangan desa, mampu menghasilkan output yang transparan, efektif, dan sepenuhnya akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku [6].

Upaya penguatan pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan validitas informasi keuangan dan menekan segala bentuk tindakan kecurangan yang merugikan institusi [7]. Meskipun demikian, aspek teknologi informasi tetap memerlukan dukungan berupa penerimaan yang positif dari para pemakainya agar dapat berfungsi optimal. Berdasarkan teori TAM (Technology Acceptance Model), proses penerimaan ini dapat dijelaskan melalui dua variabel kunci. Variabel pertama adalah persepsi kegunaan (perceived usefulness) yang mengukur manfaat fungsional sistem, sementara variabel kedua adalah persepsi kemudahan (perceived ease of use) yang mengukur seberapa rendah usaha yang diperlukan pengguna untuk menguasai sistem tersebut [8].

Analisis yang dilakukan oleh [9] memperlihatkan bahwa kedua variabel utama tersebut memiliki korelasi kuat terhadap keberhasilan implementasi SISKEUDES di lapangan. Meskipun pemanfaatan sistem ini dipandang potensial bagi kemajuan desa, masih terdapat ruang kosong dalam penelitian terdahulu yang belum mengaitkan antara efektivitas kontrol internal dan penerimaan teknologi secara utuh. Riset ini mencoba menutup ruang tersebut dengan merancang kerangka analisis yang memadukan model TAM dan prinsip-prinsip COSO dalam satu kesatuan studi. Melalui penggabungan dua paradigma ini, hasil penelitian diproyeksikan mampu menjelaskan secara detail bagaimana operasionalisasi SISKEUDES mendukung penguatan tata kelola serta transparansi keuangan sektor publik di pedesaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi berperan sebagai wadah interaksi antar-komponen yang mengolah input data menjadi output informasi yang relevan untuk kebutuhan evaluasi dan pengambilan keputusan [10]. Hal ini didukung oleh teknologi informasi yang mengintegrasikan perangkat lunak serta perangkat keras sebagai media pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang efisien. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, penggunaan sarana teknologi informasi menjadi faktor kunci untuk mendongkrak performa staf serta memastikan bahwa seluruh aktivitas komunikasi dan manajemen basis data dilakukan dengan standar akurasi yang tinggi serta durasi waktu yang lebih singkat.

Informasi keuangan yang kredibel bagi pihak manajemen dan eksternal dihasilkan melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yang mengintegrasikan proses pengumpulan, pembukuan, serta pemrosesan data transaksi secara menyeluruh [11]. Penggunaan SIA pada organisasi sektor publik tidak sekadar membantu rutinitas administrasi, namun lebih luas lagi berfungsi sebagai pendukung akuntabilitas. Dengan sistem yang terpadu, proses komunikasi data keuangan menjadi lebih transparan, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan aset publik yang lebih efektif dan efisien.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP memberikan kemudahan bagi otoritas desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara modern. Aplikasi tersebut memiliki fungsionalitas luas yang mencakup otomatisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta tata usaha hingga pada level pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban. Diterapkannya sistem digital ini ditujukan untuk meminimalisir hambatan administratif serta memperkuat nilai keterbukaan dalam manajemen dana publik di tingkat lokal. Keunggulan sistem ini terletak pada kemampuannya menghasilkan laporan yang lebih teliti dan terorganisir, sehingga selaras dengan kerangka kebijakan nasional yang sedang berlaku.

Technology Acceptance Model (TAM)

Keinginan untuk memanfaatkan sebuah sistem teknologi sering kali berakar pada bagaimana persepsi psikologis individu terhadap inovasi tersebut, sebuah konsep yang diusung oleh Davis (1989) melalui Technology Acceptance Model (TAM). Dalam model ini, terdapat dua variabel determinan yang paling berpengaruh: persepsi mengenai nilai guna (*perceived usefulness*) dan persepsi terkait kesulitan atau kemudahan operasional (*perceived ease of use*). Kombinasi dari kedua persepsi ini tidak hanya memengaruhi cara pandang atau sikap subjek terhadap teknologi, tetapi juga menjadi pendorong utama di balik keputusan mereka untuk menggunakan sistem informasi terkait [12].

Pemanfaatan teknologi informasi sangat ditentukan oleh asumsi pengguna mengenai nilai guna sistem dalam membantu efisiensi kerja dan pencapaian target profesional. Selain itu, aspek kemudahan dalam operasionalitas mencerminkan tingkat kepercayaan bahwa sistem tersebut tidak akan memberikan beban teknis yang berat bagi pemakainya. Hubungan antara nilai manfaat dan kemudahan akses ini secara kolektif akan menentukan perilaku pengguna di masa depan, baik dalam hal ketertarikan untuk mencoba sistem maupun dalam penerapan sistem tersebut secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas profesional.

Good Governance, Transparansi, dan Akuntabilitas

Paradigma *good governance* diartikan sebagai sistem manajemen pemerintahan yang mengutamakan keterbukaan, tanggung jawab, pelibatan warga, serta penggunaan aset publik secara tepat guna [13]. Di ranah manajemen finansial pedesaan, kepatuhan terhadap azas tata kelola yang baik ini berfungsi krusial guna menjamin setiap rupiah dana desa dialokasikan secara fungsional dan kredibel bagi warga setempat. Aspek transparansi menuntut kejujuran otoritas desa dalam memaparkan data keuangan kepada khalayak. Di sisi lain, akuntabilitas dipandang sebagai bentuk kewajiban moral dan legal dari pemegang mandat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah terkait penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan [14].

Sistem Pengendalian Internal (COSO)

Peran evaluatif terhadap sistem pengendalian internal dalam suatu lembaga sering kali merujuk pada standar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) sebagai basis penilaiannya. Model COSO ini merinci lima komponen kritis yang harus diawasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengawasan, sistem informasi komunikasi, dan kegiatan monitoring. Efektivitas dari penerapan komponen tersebut memegang peranan vital dalam membantu institusi menjaga asetnya, menyajikan laporan keuangan yang kredibel, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap kebijakan internal maupun peraturan pemerintah yang mengikat [15].

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori serta observasi terdahulu, penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aspek teknologi, tingkat penerimaan pengguna, serta sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam organisasi. Dalam observasi ini, pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk menganalisis tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi

Implementasi Teknologi Informasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Pendekatan Coso Dan Tam (Afika Mardiyana Nur Khasanah)

SISKEUDES, sedangkan kerangka COSO dimanfaatkan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, integrasi antara penerapan SISKEUDES, penerimaan teknologi oleh pengguna, serta implementasi sistem pengendalian internal diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah bagaimana teknologi informasi dalam wujud SISKEUDES diintegrasikan ke dalam manajemen keuangan desa. Alasan pemilihan metodologi ini adalah untuk memerinci dinamika implementasi di lapangan, memahami sikap pengguna terhadap teknologi tersebut, serta mengidentifikasi pola pengendalian internal yang dipraktikkan. Analisis data dilakukan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada dua dimensi, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi dengan merujuk pada model TAM, serta tingkat efektivitas kontrol internal organisasi yang dianalisis menggunakan standar internasional dari kerangka COSO.

Implementasi aplikasi SISKEUDES menjadi parameter utama dalam menentukan lokasi observasi, yang mana terpilihlah Desa Baran, Desa Daleman, dan Desa Lawu di Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan penggunaan sistem informasi tersebut dalam menunjang kegiatan administrasi keuangan pada tingkat pemerintahan desa. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan analisis pada aspek operasional sistem, bukan pada variabel lain seperti besaran transfer dana yang dikelola atau dinamika kebijakan dana desa. Hal ini dilakukan agar diperoleh gambaran yang objektif mengenai kemandirian desa dalam mengelola data keuangan secara digital melalui platform tersebut.

Peneliti mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua kategori, yakni data primer dan data sekunder, guna mendukung kedalaman analisis. Data primer dihimpun secara mandiri melalui interaksi langsung dengan informan lewat wawancara serta pengisian kuesioner. Pihak-pihak yang menjadi narasumber utama adalah para pengguna aktif SISKEUDES, yaitu Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Sebagai pelengkap, masyarakat desa turut disertakan dalam proses pengambilan data untuk memberikan testimoni mengenai transparansi tata kelola. Keterlibatan warga berfungsi untuk memverifikasi apakah penggunaan sistem teknologi tersebut secara nyata telah meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Data sekunder didapatkan melalui pencarian dokumen-dokumen penting yang mendasari penerapan sistem keuangan digital di desa. Berbagai dokumen seperti profil desa, desain struktur organisasi, SOP penggunaan aplikasi keuangan, hingga laporan keuangan tahunan menjadi rujukan utama dalam teknik dokumentasi ini. Peneliti menggunakan bukti-bukti dokumenter tersebut untuk memberikan validasi tambahan terhadap pernyataan para informan. Dengan demikian, hasil wawancara tidak berdiri sendiri melainkan diperkuat oleh bukti otentik, sehingga proses verifikasi informasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara lebih akurat dan objektif.

Strategi pengumpulan data dalam kajian ini mengombinasikan teknik dokumentasi, penyebaran kuesioner, serta pelaksanaan wawancara. Peneliti menerapkan metode wawancara semi-terstruktur guna mengeksplorasi secara komprehensif terkait pengalaman nyata serta sudut pandang para pengguna aplikasi SISKEUDES. Fokus utama dalam dialog tersebut mencakup dua pilar: tingkat akseptasi teknologi yang ditinjau melalui kerangka TAM meliputi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*) serta performa kontrol internal menurut standar COSO yang terdiri atas lingkungan pengendalian, estimasi risiko, prosedur kontrol, sistem informasi komunikasi, hingga mekanisme pengawasan.

Guna melengkapi data hasil wawancara, penelitian ini pun menyertakan kuesioner sebagai media pelengkap untuk menjaring persepsi responden secara lebih terukur dan sistematis. Instrumen kuesioner tersebut ditujukan bagi Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dan Sekretaris Desa untuk memetakan kecenderungan mereka dalam mengadopsi teknologi serta penerapan kontrol internal pada penggunaan SISKEUDES. Di sisi lain, metode dokumentasi diterapkan untuk menghimpun data tertulis yang berkaitan dengan operasionalitas sistem, yang mencakup laporan realisasi anggaran, berkas kebijakan tata kelola keuangan, hingga beragam

platform informasi publik yang digunakan perangkat desa dalam memaparkan data anggaran kepada warga setempat.

Upaya validasi data dalam studi ini ditempuh melalui strategi triangulasi sumber serta metode untuk meminimalisir subjektivitas penelitian. Pada aspek triangulasi sumber, peneliti melakukan verifikasi silang terhadap keterangan yang diberikan oleh perangkat desa di satu sisi dan masyarakat umum di sisi lainnya. Di saat yang bersamaan, triangulasi metode diaplikasikan dengan cara menguji keselarasan data yang bersumber dari hasil wawancara, pengumpulan dokumen, serta pengisian kuesioner oleh responden. Melalui pendekatan integratif ini, tingkat akurasi dan stabilitas informasi yang terkumpul dapat dipastikan tetap terjaga sesuai dengan standar penelitian ilmiah.

Pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis tematik diaplikasikan dengan mengikuti prosedur reduksi data, kategorisasi, pengemasan data, hingga penarikan konklusi. Fokus awal terletak pada upaya reduksi, di mana peneliti memilah dan merangkul data mentah dari lapangan untuk memperoleh inti sari yang sesuai dengan fokus amatan. Langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengelompokan data ke dalam kode-kode tematik yang relevan dengan variabel-variabel teoretis. Melalui proses pengkodean ini, data mentah ditransformasikan menjadi kategori yang lebih terstruktur untuk mendukung pembuktian hipotesis atau jawaban dari rumusan masalah.

Tahapan berikutnya dalam proses analisis adalah menyintesis pola dan hubungan fungsional di antara data-data yang telah diperoleh. Fokus observasi ini bertumpu pada penerapan TAM untuk menganalisis akseptasi teknologi oleh operator melalui variabel kemudahan dan manfaat sistem, serta penggunaan standar COSO guna mengevaluasi kualitas pengendalian internal organisasi desa melalui lima elemen kontrolnya. Data yang telah dianalisis tersebut kemudian diuji silang dengan teori-teori relevan dan hasil observasi terdahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan inferensi yang akurat mengenai efisiensi penggunaan SISKEUDES dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengendalian Internal Berdasarkan Kerangka COSO

Data penelitian membuktikan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di lingkungan Desa Daleman, Lawu, dan Baran telah menjadi katalis bagi terciptanya sistem pengendalian internal yang lebih terorganisir. Analisis ini dipandu oleh komponen-komponen dalam kerangka COSO yang meliputi penciptaan lingkungan kontrol, mitigasi risiko, pelaksanaan kegiatan pengawasan, pertukaran informasi, serta aktivitas pemantauan sistemik. Fokus dari kajian ini adalah untuk menilai kapasitas SISKEUDES dalam membantu pemerintah desa mencapai efektivitas kontrol internal, sehingga setiap proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik.

Tabel 1. Implementasi Pengendalian Internal Berdasarkan Kerangka COSO

Komponen COSO	Temuan Observasi	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	Penggunaan akun login pribadi pada sistem SISKEUDES serta pembagian tugas antara Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan	Menciptakan tanggung jawab individual dan meningkatkan integritas pengelolaan keuangan desa
Penilaian Risiko	Sistem memiliki fitur validasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan input data dan keterlambatan pelaporan	Mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan penyimpangan dana desa
Aktivitas Pengendalian	Proses verifikasi transaksi dilakukan sebelum laporan disahkan	Menjamin setiap transaksi telah melalui prosedur yang ditetapkan
Informasi dan Komunikasi	Informasi keuangan desa disampaikan melalui sistem dan media publik	Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Implementasi Teknologi Informasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Pendekatan Coso Dan Tam (Afika Mardiyana Nur Khasanah)

Pemantauan	Adanya pengawasan dari pemerintah daerah dan audit internal	Menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
-------------------	---	--

Berdasarkan Tabel 1, komponen lingkungan pengendalian dapat dilihat dari adanya pembagian tugas yang jelas di antara perangkat desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Setiap pengguna memiliki akun login tersendiri sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam sistem dapat ditelusuri melalui fitur audit trail. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab individu dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pada komponen penilaian risiko, penggunaan SISKEUDES membantu perangkat desa dalam mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penginputan data keuangan. Sistem secara otomatis memberikan pemberitahuan apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau ketika jumlah anggaran yang dimasukkan melebihi batas yang telah ditentukan. Dengan adanya fitur tersebut, potensi kesalahan pencatatan maupun penyimpangan dalam penggunaan dana desa dapat diminimalkan.

Selanjutnya, aktivitas pengendalian tercermin melalui penerapan mekanisme verifikasi berlapis terhadap setiap transaksi keuangan desa. Data yang diinput oleh Kaur Keuangan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Sekretaris Desa sebelum disahkan sebagai laporan keuangan resmi. Proses ini menunjukkan adanya pemisahan tugas yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan serta ketepatan informasi keuangan desa.

Pada aspek informasi dan komunikasi, pemanfaatan SISKEUDES memungkinkan perangkat desa memperoleh data keuangan dengan lebih cepat serta tersusun secara sistematis. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti baliho APBDes dan forum musyawarah desa. Namun demikian, penggunaan media digital seperti website desa masih belum dimaksimalkan sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata.

Untuk menjamin integritas, proses pemantauan dilakukan melalui jalur pengawasan yang menyertakan partisipasi dari pihak internal maupun lembaga eksternal. Pemerintah desa bertindak melakukan tinjauan berkala pada sistem informasi keuangan, yang kemudian disinkronisasikan dengan inspeksi dari pemerintah daerah serta inspektorat guna melakukan verifikasi atas kesesuaian prosedur pengelolaan anggaran desa. Harapannya, melalui tahapan pengawasan yang sistematis ini, aplikasi SISKEUDES mampu memfasilitasi terciptanya pola administrasi keuangan desa yang lebih tertata, akurat, dan terbuka terhadap kontrol publik.

Penerimaan Teknologi SISKEUDES Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM)

Fred Davis memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang dikenal sebagai Technology Acceptance Model (TAM), yang diaplikasikan dalam penelitian ini untuk membedah sejauh mana aparatur desa menerima sistem SISKEUDES. Di dalam model tersebut, dijelaskan bahwa kesediaan seseorang untuk mengadopsi suatu sistem sangat ditentukan oleh dua elemen krusial: kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) serta tingkat kemudahan pemakaian yang dirasakan (*perceived ease of use*). Kedua variabel ini menjadi parameter utama untuk memahami perilaku pengguna dalam mengoperasikan teknologi informasi di tingkat desa.

Tabel 2. Tingkat Penerimaan Teknologi SISKEUDES

Indikator TAM	Hasil Temuan	Keterangan
Perceived Usefulness	Sistem membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan dan mengurangi kesalahan pencatatan	Pengguna merasakan manfaat sistem dalam meningkatkan kinerja
Perceived Ease of Use	Sistem relatif mudah dipahami setelah mengikuti pelatihan	Pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan baik

Informasi yang tertera pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari sudut pandang manfaat teknologi, para pengelola keuangan desa merasa sangat terbantu oleh kehadiran SISKEUDES dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa mengakui bahwa sistem tersebut sanggup mempersingkat birokrasi penyusunan laporan serta memberikan tingkat ketelitian yang lebih baik dibandingkan pencatatan manual. Selain mempermudah tugas

administratif, aplikasi ini menjadi alat bantu yang krusial bagi mereka dalam memonitor setiap perkembangan realisasi dana desa agar tetap berada pada koridor perencanaan anggaran yang sudah disepakati.

Pada aspek perceived ease of use, sebagian besar pengguna menyatakan bahwa aplikasi SISKEUDES relatif mudah digunakan setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, beberapa perangkat desa masih menghadapi kesulitan ketika terjadi pembaruan sistem atau perubahan fitur dalam aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar para pengguna dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem yang ada.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Adopsi teknologi SISKEUDES berkontribusi besar dalam menstimulasi terciptanya iklim pengelolaan dana desa yang jauh lebih akuntabel dan transparan. Kondisi tersebut termanifestasi dalam tindakan nyata pemerintah desa yang secara jujur memaparkan data serta perkembangan penggunaan dana desa kepada seluruh penduduk setempat. Dengan adanya kemudahan akses terhadap data keuangan ini, hubungan antara pemerintah desa dan konstituennya menjadi lebih harmonis, karena setiap kebijakan finansial yang diambil dilaporkan secara gamblang dan dapat diuji kebenarannya oleh masyarakat umum.

Tabel 3. Media Transparansi Informasi Dana Desa

Media Informasi	Bentuk Informasi	Tujuan
Baliho APBDes	Informasi anggaran dan realisasi kegiatan	Memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung
Musyawarah Desa	Penyampaian rencana dan laporan kegiatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Website Desa	Informasi profil desa dan kegiatan pembangunan	Mendukung transparansi berbasis digital

Berdasarkan Tabel 3, pemerintah desa telah memanfaatkan berbagai media untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Baliho APBDes menjadi media yang paling sering digunakan karena dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat secara langsung. Selain itu, forum musyawarah desa juga berperan sebagai sarana penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait pemanfaatan dana desa.

Namun demikian, penggunaan media digital seperti website desa masih belum dimaksimalkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi digital masyarakat serta kurangnya pembaruan informasi pada platform tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar transparansi pengelolaan dana desa dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Secara komprehensif, temuan riset ini mengindikasikan bahwa integrasi SISKEUDES telah membawa perubahan signifikan bagi kemajuan manajemen finansial di tingkat desa. Kehadiran instrumen digital ini tidak sekadar memudahkan aparat desa dalam menjalankan administrasi keuangan secara tepat guna dan hemat waktu, namun juga berperan sentral dalam memperkokoh pilar keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban publik dalam pemanfaatan anggaran desa di hadapan warga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis mengenai integrasi SISKEUDES yang ditinjau dari kerangka Technology Acceptance Model dan COSO di Desa Daleman, Baran, dan Lawu menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal telah berfungsi secara efektif di lingkup pemerintahan desa. Ketangguhan pengendalian ini dibuktikan dengan adanya sistem pengecekan ganda yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Kaur Keuangan bersama Sekretaris Desa untuk setiap data transaksi. Selain faktor manusia, keunggulan teknis berupa fitur rekam jejak

Implementasi Teknologi Informasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dengan Pendekatan Coso Dan Tam (Afika Mardiyana Nur Khasanah)

digital (audit trail) dalam aplikasi menjadi instrumen vital untuk memantau aktivitas seluruh pengguna secara akurat. Hal ini memastikan bahwa segala bentuk anomali atau penyalahgunaan dalam manajemen keuangan desa dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Dilihat dari perspektif penerimaan teknologi, perangkat desa sebagai pengguna utama, terutama Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap penggunaan SISKEUDES. Sistem ini dinilai mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta membantu mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara lebih sistematis dan akurat. Secara keseluruhan, penerapan pengendalian internal yang mengacu pada kerangka COSO, yang didukung oleh penerimaan teknologi berdasarkan model TAM, memberikan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan pada aspek transparansi eksternal, khususnya dalam penyampaian informasi berbasis digital kepada masyarakat. Informasi mengenai pengelolaan dana desa masih lebih sering disampaikan melalui media konvensional, seperti baliho APBDes dan forum musyawarah desa. Sementara itu, pemanfaatan website desa sebagai sarana transparansi digital belum dimanfaatkan secara optimal karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan media tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan dalam menuntaskan penelitian ini merupakan buah dari kolaborasi dan bantuan berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Penulis menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Daleman, Lawu, serta Baran di Kecamatan Nguter yang telah membuka pintu bagi penulis untuk melakukan pengumpulan data dengan sangat kooperatif. Rasa terima kasih juga mengalir bagi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan penduduk desa yang terlibat aktif sebagai responden dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, penulis memberikan penghargaan khusus kepada dosen pembimbing serta individu lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala saran, bantuan teknis, dan dukungan emosional selama proses studi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Sujarweni, "Akuntansi Desa," *Yogyakarta: Pustaka Press*, 2019.
- [2] Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru (Mardiasmo, Ed.; I)," *Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)*, 2018.
- [3] H. J., "Konsep Sistem Informasi," *Yogyakarta: Deepblish*, 2015.
- [4] Y. G. S. & N. P. Dwi Nurrahmawati, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis," *Jurnal Observasi Mahasiswa*, no. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.86>, pp. 2(2), 101–115, 2023.
- [5] S. K. K. & T. K. Hidayani, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, no. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26538>, pp. 8(3), 406–417, 2023.
- [6] R. E. Junusi, "COSO-based internal control: efforts towards good university governance," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, no. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4773>, pp. 2(1), 27, 2020.
- [7] N. R. & D. M. A. Permata, "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Maumere," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, vol. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3862>, pp. 9(1), 88–95, 2021.
- [8] I. & E. B. Santi, "Technology Acceptance Model (TAM)," *Pekalongan: Penerbit NEM*, 2021.
- [9] N. F. K. M. R. A. T. A. L. N. D. R. H. & B. R. T. Pala, "Evaluasi Keberhasilan Aplikasi SISKEUDES Dengan Menggunakan Model TAM dan DeLone & McLean Di Kabupaten Gorontalo," *Journal Automation Computer Information System*, vol. <https://jacis.pubmedia.id/index.php/jacis/article/view/105/79>, pp. 5(1), 105–115, 2025.
- [10] J. Tyoso, "Sistem Informasi Manajemen," *Yogyakarta: Deepublish*, 2016.

- [11] Mulyadi, "Sistem Akuntansi," *Jakarta: Salemba Empat*, 2016.
- [12] Santi, I.H., & Erdani, "Technology Acceptance Model (TAM)," *Pekalongan: Penerbit NEM*, 2021.
- [13] Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik," *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 2018.
- [14] H. & K. M. W. Puspitarini, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.*, 2022.
- [15] R. A. H. H. & N. N. Tahang, "Government Internal Control System, Role and Comparison of the Committee of Sponsoring Organization (COSO) Revised Internal Control Framework," *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, vol. <https://doi.org/10.26618/inv.v5i1.10525> , pp. 5(1), 1–7., 2023.